

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan bagian penting bagi sebuah negara. Dengan adanya pendapatan pajak, maka akan sangat menunjang pembangunan karena pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara yang berasal dari iuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang harus ditanggung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009, PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Ditinjau dari ilmu perpajakan, PPN termasuk dalam kategori: (1) pajak objektif, (2) pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan (3) pajak tidak langsung. Menurut Sukardji (2015:20) pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yang disebut *taatbestand*. Istilah tersebut mengacu kepada keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan objek pajak. PPN sebagai pajak objektif dapat diartikan sebagai kewajiban membayar pajak oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi. Siapapun yang mengonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN, akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa tersebut. Subjek pajak dalam pengertian pajak objektif adalah konsumen yaitu selaku pihak yang memikul beban pajak. Di samping sebagai pajak objektif, PPN di Indonesia termasuk dalam kategori pajak atas konsumsi. Ditinjau dari

hukum perpajakan, pajak atas konsumsi adalah pajak yang timbul akibat suatu peristiwa hukum yang menjadi beban konsumen baik secara yuridis maupun ekonomis.

Selanjutnya, selain sebagai pajak objektif dan pajak atas konsumsi, PPN juga termasuk Pajak Tidak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, beban pembayaran pajaknya dipikul oleh konsumen, namun penanggungjawab atas penyetoran PPN ke Kas Negara dibebankan kepada penjual. Dengan kata lain dalam mekanisme pemungutan PPN, pemikul beban pembayaran PPN dan penanggungjawab penyetoran PPN ke Kas Negara adalah pihak yang berbeda.

Apabila pajak merupakan pendapatan bagi negara, lain halnya bagi perusahaan. Mangoting (1999:43) menyatakan bahwa bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan perencanaan pajak yaitu upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku.

PPN merupakan salah satu komponen penting bagi perusahaan, oleh karena itu dibutuhkan perencanaan yang baik agar pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran yang dimiliki dapat optimal serta menjadikan arus kas perusahaan lebih teratur sehingga perusahaan dapat

menggunakan kas yang dimilikinya dengan optimal. Pasal 9 Ayat 9 Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

CV. X merupakan perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayarkan PPN karena telah memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, dalam praktiknya, CV. X belum memenuhi kewajibannya untuk membayar PPN. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah untuk CV. X dikemudian hari seperti munculnya sanksi administrasi.

CV. X bergerak di bidang percetakan dan berdomisili di Kota Blitar. Fokus utama perusahaan ini adalah membuat Buku Alumni Tahunan Sekolah (*Yearbook*), Buku Profil Instansi, kalender, serta majalah. Selain itu, perusahaan ini juga menerima banyak order selain barang-barang tersebut seperti *souvenir* kantor serta *souvenir* pernikahan. CV. X selama ini telah mendapat kepercayaan dari sejumlah instansi pemerintah dan sekolah untuk melakukan kerjasama.

Namun, di balik kesuksesannya, CV. X masih memiliki kelemahan pada bagian internalnya. Perusahaan baru menggunakan aplikasi komputer akuntansi sekitar satu tahun sejak awal 2016 dikarenakan omzet perusahaan yang semakin besar. Aplikasi tersebut dioperasikan oleh staff administrasi

yang tidak memahami tentang perencanaan pajak sehingga tidak dapat menganalisis laporan keuangan untuk melakukan pengambilan keputusan terkait perencanaan pajak perusahaan. Untuk mengefisiensikan beban perpajakannya, CV. X harus melakukan strategi perencanaan pajak yang baik agar dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Strategi perencanaan pajak ini harus dilakukan dengan teknik-teknik yang legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan sehingga tidak menimbulkan masalah bagi wajib pajak di kemudian hari..

Sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maka di setiap transaksi penjualannya CV. X wajib memungut PPN serta menyetorkan PPN yang telah dipungut. Karena selama ini perusahaan belum pernah memungut PPN dari konsumennya serta belum pernah menyetorkan PPN atas barang produksinya, maka perusahaan terancam dikenai sanksi administrasi yang jumlahnya cukup signifikan serta harus membayarkan PPN Terutang yang belum dibayarkan. Hal tersebut tentunya akan merugikan perusahaan karena akan mengganggu aliran kas perusahaan. Kas yang seharusnya dapat digunakan untuk operasional perusahaan harus dialihkan untuk membayar beban sanksi administrasi PPN. Selain itu, CV. X selama ini tidak melakukan pembelian bahan baku dari perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Akibatnya, perusahaan tidak dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan apabila nanti telah secara rutin menyetorkan PPN Terutang yang diakui sebagai Pajak Keluaran oleh perusahaan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Tyastuti (2010) di Perusahaan X. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan X yang seharusnya telah mendaftarkan diri sebagai PKP karena omzetnya telah melampaui batasan pengusaha kecil sampai saat penelitian dilakukan perusahaan belum mendaftarkan diri sebagai PKP. Hal tersebut mengakibatkan Perusahaan X harus menanggung sanksi administrasi karena terlambat melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Keterlambatan melaporkan diri sebagai PKP tersebut membuat perusahaan tidak membuat Faktur Pajak dan terlambat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN-nya. Selain itu, Perusahaan X selama ini belum melakukan pembukuan sehingga dalam menghitung pajaknya perusahaan menggunakan norma perhitungan. Dari permasalahan tersebut, peneliti memberikan beberapa alternatif perencanaan pajak agar tidak terjadi pemborosan sumber daya perusahaan yaitu dengan segera mendaftarkan diri sebagai PKP, menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan yang berlaku, ekualisasi omzet PPN dan PPh, membayar PPN tepat waktu, bertransaksi dengan PKP, serta menyelenggarakan pembukuan untuk kegiatan akuntansinya.

Penelitian lain yang membahas tentang perencanaan pajak untuk PPN adalah milik Atmojo, Rahayu, dan Budihardjo (2015). Penelitian tersebut dilakukan di CV. Guyub Rukun Putra Sakti (GRPS) yang telah berstatus sebagai PKP. Penelitian ini menunjukkan bahwa CV. GPRS sebelumnya telah melakukan perencanaan pajak menggunakan penundaan pengkreditan Pajak Masukan. Perencanaan tersebut terbukti mampu untuk meratakan PPN

Terutang sehingga tidak ada lagi PPN yang lebih bayar. Selain perencanaan pajak yang telah dilakukan perusahaan, peneliti memberikan alternatif perencanaan pajak tambahan yaitu dengan melakukan pembelian seluruh BKP dengan PPN. Hal tersebut mampu meminimalkan PPN Terutang sebesar 15%. Apabila mekanisme penundaan pengkreditan Pajak Masukan serta melakukan pembelian seluruh BKP dengan PPN digabungkan maka akan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan sebesar 22%.

Penelitian lain dilakukan oleh Mildawati dan Leo (2013) di CV. MMM. Penelitian ini menunjukkan bahwa CV. MMM telah dikukuhkan sebagai PKP. Dari analisis peneliti, perusahaan diduga belum mengkreditkan seluruh Pajak Masukannya. Pajak Masukan yang selama ini dikreditkan hanya berasal dari pembelian bahan baku saja. Peneliti memberikan saran perencanaan pajak yang lain yaitu dengan penerapan perencanaan pajak atas pembelian aktiva perusahaan berupa mobil, perencanaan pajak atas jasa periklanan (infomedia) dan kuitansi telepon sebagai Pajak Masukan, serta perencanaan pajak sebagai sarana pengendalian arus kas dengan cara penundaan pelaporan Pajak Masukan pada masa tidak sama. Perencanaan pajak tersebut terbukti memberikan hasil penghematan pajak yang cukup signifikan dan bermanfaat bagi perusahaan.

Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan perencanaan pajak yang disarankan untuk perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, ada beberapa persamaan perencanaan pajak yang dapat dilakukan

yaitu dengan melakukan pembelian BKP kepada PKP, mengkreditkan seluruh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta melakukan penundaan pengkreditan Pajak Masukan pada masa pajak berikutnya untuk mengendalikan arus kas. Dari penelitian tersebut, peneliti akan menganalisis perencanaan pajak yang sesuai untuk CV. X. Sejauh ini, belum ada penelitian sebelumnya yang menggunakan CV. X sebagai objek penelitian yang membahas mengenai penerapan perpajakan atas PPN. Selain itu, selama ini CV. X belum menerapkan perencanaan pajak. Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini peneliti bermaksud membuat konsep perencanaan pajak atas PPN untuk CV. X dengan judul penelitian **“Konsep Perencanaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada CV. X)”**.

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa permasalahan yang ada dalam CV. X berkaitan dengan PPN?
2. Bagaimana perencanaan pajak atas PPN yang dapat diterapkan CV. X agar dapat dilakukan penghematan pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui permasalahan yang ada dalam CV. X berkaitan dengan PPN.
2. Mengetahui perencanaan pajak atas PPN yang tepat untuk CV. X agar dapat dilakukan penghematan beban pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mendalami ketentuan perpajakan serta sebagai alat untuk menambah wawasan mengenai perencanaan pajak, mulai dari pengertian, tahapan penerapan sampai pada hasil dari perencanaan pajak tersebut, khususnya perencanaan pajak atas PPN di perusahaan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi perusahaan, memberikan masukan kepada manajemen CV. X untuk menerapkan perencanaan pajak atas PPN sehingga dapat melakukan penghematan pajak.
- b. Bagi peneliti/mahasiswa, dapat digunakan sebagai praktik nyata dari ilmu yang diperoleh di universitas serta dapat mengamati secara langsung bagaimana implementasinya di perusahaan. Selain itu, juga memberikan bekal bagi peneliti/mahasiswa saat bekerja nanti.
- c. Bagi peneliti lain, dapat memberikan gambaran mengenai proses perencanaan pajak pada suatu badan usaha serta sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam membahas permasalahan perpajakan.
- d. Bagi umum, dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam praktik usaha.